

ABSTRAK

Penelitian ini berlatar belakang kasus perjudian di kalangan masyarakat Kudus yang semakin meresahkan masyarakat. Pedoman yuridis pada kasus ini mengacu kepada KUHP dalam Pasal 303 bis ayat 1. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggali: (1) Untuk menganalisis pemidanaan terhadap pelaku Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Kudus, (2) Untuk menganalisis hasil putusan hakim terhadap perkara Tindak pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Kudus, (3) Untuk menganalisis bagaimana kebijakan tindak pidana perjudian dalam pembaharuan KUHP yang akan datang.

Dalam penulisan ini penulis mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara terhadap hakim yang memutuskan kasus perjudian di Pengadilan Negeri Kudus dan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian dengan melakukan kajian-kajian berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian di kota Kudus. Kemudian permasalahan di analisis dengan teori tujuan pemidanaan dan teori bekerjanya hukum/efektifitas hukum.

Penelitian ini menghasilkan temuan fakta hukum yaitu: adanya tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus sesuai putusan Nomor Perkara 119/Pid. B/ 2018/ PN Kds. Dasar dari proses pemidanaan adalah adanya perbuatan, kesalahan, dan pemidanaan. Rata-rata tuntutan untuk tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus adalah 6 (enam) bulan hingga 1 (satu) tahun, akan tetapi hasil tuntutan tidak sama dengan putusan, secara umum hakim menjatuhkan putusan untuk tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Kudus rata-rata 4 (empat) bulan hingga 7 (tujuh) bulan. Salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Kudus, mengatakan bahwa tugas utama seorang hakim tidak serta merta hanya menjatuhkan hukuman kepada pelanggar saja, namun pula memikirkan konsekuensi dari penjatuhan hukuman, efek serta memikirkan dampak apa yang akan terjadi nantinya setelah penjatuhan saksi. Melihat dari semakin maraknya perjudian pemerintah harus membuat peraturan baru dalam pembaharuan KUHP tentang pelarangan pemerintah daerah untuk memberikan izin kepada pihak terkait, bukan seperti dalam pasal 303 bis yang mengacu melegalkan perjudian jika ada izin dari pemerintah yang berwenang sesuai dengan PPRI No.9 tahun 1981 dan menghapuskan diksi multi tafsir yang terdapat di Pasal 303 dan 303 bis atau di RUU Pasal 505 dimana tentang pemberian izin pejabat yang berwenang dalam melegalkan tindak perjudian

Kata Kunci: Perjudian, KUHP Pasal 303, Pidana Kurungan

ABSTRACT

The background of this research is the case of gambling in the society of Kudus that becomes increasingly troubling. Juridical guidelines on this case refers to the Criminal Code in Article 303 bis Section 1. This research aims to find and discover: (1) To analyze how to convict the perpetrators of Gambling Crimes in the Kudus District Court, (2) To analyze the judge's decision on the case of Gambling Crimes in the Kudus District Court, (3) To analyze the gambling crime policy in the renewal of the upcoming Criminal Code.

In conducting the research, the researcher collected data by using interview technique to judges who decided the gambling crimes in the Kudus District Court and using the sociological juridical approach method, namely a study by conducting studies based on laws and regulations and the operation of law in the society relating to criminal acts of gambling on Kudus. Then the problems are analyzed by the purpose of criminal theory and the legal / effective legal working theory.

The results of the research show some law facts including: there were gambling crimes in the Kudus District Court according to the decision of Case Number 119/Pid. B/2018/PN Kds. The basics of the punishment process were act, fault, and punishment. The average of demands for gambling crimes in the Kudus District Court was 6 (six) months to 1 (one) year, however, the demands were not the same with the decisions, in general the judge would decide the punishment of gambling crimes in the Kudus District Court for about 4 (four) to 7 (seven) months. One of the judges in the Kudus District Court said that the main task of a judge was not only to sentence the perpetrators, but also to think the consequences and effects of the sentence, and the impacts that would be happened after imposition of sanction. In consequence of the increase in gambling cases, the government should make new regulations of the renewal of Criminal Code on prohibition of regional government in permitting related parties, not as in Article 303 bis which refers to legalizing gambling if there is a permission from authorized government according to the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 1981 and to erase dictions that have multiple interpretations on Article 303 and 303 bis or in Bill Article 505 on the permission of authorized officials in legalizing gambling.

Keywords: Gambling, Criminal Code Article 303, Detention